

PENDIDIKAN BERTANGGUNG JAWAB MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA BARU

Oleh: Haryanto

FIP Universitas Negeri Yogyakarta

Diterima 13 April 2001 / disetujui 24 Juli 2001

Abstract

The discourse on the civil society as the new Indonesian society which has been reverberating in society lately is still in the phase of slogans being discussed and debated upon. The concept and realization of such a type of society still need to be clearly formulated.

The essence of that type of society is that it is democratic, upholds the supremacy of law, establishes basic human rights, develops science and technology, accommodates diversity, is environmentally oriented, and holds belief in God.

Its realization requires reorientations in education especially in terms of the curriculum, instructional strategy, teacher-learner relation, and evaluation.

Key words: civil society, reorientation in education

Pendahuluan

Wacana tentang Masyarakat Indonesia Baru yang bermula dari istilah masyarakat madani atau *civil society* (yang lebih tepat *civilized society*) menjadi semakin marak dengan tinjauan atau sudut pandang yang beragam. Bahkan para ahli pendidikan menjadikan wacana Masyarakat Indonesia Baru sebagai isu menarik untuk dikaji dalam rangka mencari solusi untuk mewujudkan Masyarakat Indonesia Baru melalui reorientasi atau bahkan reformasi sistem pendidikan nasional.

Kajian-kajian yang dilakukan para ahli pendidikan menjadi suatu keharusan sebab masyarakat menaruh harapan cukup besar terhadap institusi pendidikan agar mampu menyiapkan dan menciptakan manusia yang siap mewujudkan Masyarakat Indonesia Baru. Pada kenyataannya memang institusi pendidikanlah yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan Masyarakat Indonesia Baru. Apalagi bila dikaitkan dengan banyaknya kritik tentang kegagalan pendidikan kita yang dilontarkan oleh masyarakat menjadikan kajian tentang

Masyarakat Indonesia Baru kaitannya dengan reorientasi sistem pendidikan nasional merupakan sesuatu yang penting.

Oleh sebab itu, dalam artikel ini akan dikaji perwujudan Masyarakat Indonesia Baru melalui reorientasi sistem pendidikan nasional. Pembahasan akan diawali dari pemaparan ciri-ciri Masyarakat Indonesia Baru dan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan implikasi bagi pendidikan kita.

Ciri Masyarakat Indonesia Baru

Masyarakat Indonesia Baru semakin banyak digunakan orang sebagai upaya menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bangsa Indonesia setelah tumbang rezim orde baru. Masyarakat Indonesia Baru menjadi visi bangsa Indonesia sebagai kritik atas situasi yang ada selama ini.

Istilah Masyarakat Indonesia Baru (ada yang menyebutnya sebagai Masyarakat Madani atau *civil society*) digunakan sebagai upaya untuk 'menggugat' penggunaan istilah 'masyarakat Pancasila', 'masyarakat demokrasi terpimpin' atau

'masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebab istilah-istilah tersebut lebih terasa sebagai slogan politik, yang pada kenyataannya tidak pernah terwujud.

Apa sesungguhnya ciri Masyarakat Indonesia Baru itu? Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan ciri-ciri Masyarakat Indonesia Baru. Hikam (1996) yang mengambil pemikiran seorang ahli politik Prancis Alexis de Tocqueville, mengemukakan bahwa ciri Masyarakat Indonesia Baru meliputi adanya suatu; kesukarelaan, keswasembadaan, kemandirian tinggi terhadap negara, dan kepedulian terhadap nilai-nilai hukum yang dipatuhi bersama.

Masyarakat Indonesia Baru bukanlah suatu masyarakat paksaan tetapi masyarakat yang mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Dengan demikian, tanggung jawab pribadi menjadi penting sebagai pengikat keinginan untuk mewujudkan cita-cita bersama.

Masyarakat Indonesia Baru *tidak terlalu* bergantung kepada negara, juga *tidak terlalu* bergantung kepada bantuan lembaga-lembaga atau organisasi lain. Keanggotaan Masyarakat Indonesia Baru adalah keanggotaan yang penuh percaya diri, mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan masyarakatnya.

Anggota Masyarakat Indonesia Baru adalah manusia-manusia yang percaya diri sehingga tidak tergantung kepada perintah orang lain termasuk negara. Negara adalah kesepakatan bersama sehingga tanggung jawab yang lahir dari kesepakatan tersebut adalah juga tuntutan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota. Inilah yang disebut negara berkedaulatan rakyat.

Masyarakat Indonesia Baru adalah masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Semua anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

Sementara itu, Sastrapratedja (1999) mengemukakan bahwa rumusan mengenai Masyarakat Indonesia Baru ditekankan pada: demokratisasi, supremasi hukum, kebebasan mengutarakan pendapat dan berserikat, keadilan dan pemerataan, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan ciri-ciri Masyarakat Indonesia Baru sebagai berikut.

1. Demokratis

Pada tingkat supra struktur politik demokrasi harus ditandai dengan kuatnya kedudukan dan peran lembaga-lembaga perwakilan/permusyawaratan rakyat baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pada tingkat infra struktur politik hal ini ditandai oleh kuatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, kuatnya peran media masa, kuatnya peran partai-partai politik, terbentuknya kesempatan luas bagi kegiatan-kegiatan gerakan sosial dan perhimpunan-perhimpunan pekerja, serta semakin menurunnya peran lembaga militer dan personil militer aktif di luar bidang pertahanan dan keamanan negara.

2. Penegakan Hukum dan Keadilan

Pada tingkat supra struktur penegakan hukum dan keadilan ditandai dengan mandirinya lembaga tinggi negara yudikatif, kuatnya moral para penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengacara, dan hakim, serta kuatnya kontrol sosial dari masyarakat dalam setiap penegakkan hukum. Semua peraturan dan kebiasaan masyarakat yang memberi peluang bagi perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dihilangkan. *Good government* harus betul-betul ditegakkan dan para pejabat pemerintah dan pejabat negara harus mengumumkan kekayaan pribadi dan pajak-pajak mereka sebelum dan sesudah memegang jabatan.

3. Penegakan Hak-hak Asasi Manusia

Penegakkan hak-hak asasi manusia ditandai dengan perlakuan aparat pemerintah dan negara kepada rakyat secara manusiawi tanpa memandang status. Semua anggota masyarakat diberi peluang seluas-luasnya untuk mencapai, memperoleh, dan memperjuangkan hak-hak asasinya dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum.

4. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Masyarakat Indonesia baru yang dicita-citakan haruslah masyarakat yang maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi karena hanya dengan itu kita dapat berpartisipasi bahkan mengambil peluang-peluang dalam proses globalisasi. Masyarakat Indonesia Baru haruslah masyarakat yang rasional yang tidak dipenuhi oleh *tahayul-tahayul* yang menumpulkan rasionalitas masyarakat. Lebih dari itu kualitas kemajuan dan teknologi haruslah berada pada tingkat setara dengan perkembangan masyarakat dunia sehingga sumber daya manusia Indonesia juga akan dapat berkompetisi pada masyarakat global.

5. Pengakomodasian Pluralisme Masyarakat

Seperti halnya masyarakat urban dan industri masyarakat Indonesia baru akan ditandai dengan pluralisme masyarakat baik dari segi ras, suku, agama, maupun golongan. Semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan berkesempatan sama terhadap pemerintahan. Kerukunan hidup beragama menjadi pernyataan dan sekaligus perbuatan para pemuka dan pengikut agama. Berkaitan dengan itu partai-partai politik juga harus mendorong pluralisme dengan berperan sebagai partai yang inklusif, yang terbuka untuk semua ras, suku, agama, dan golongan.

6. Pengembangan Masyarakat berwawasan lingkungan

Pembangunan masyarakat Indonesia Baru harus bersifat berkelanjutan. Karena itu, harus senantiasa diperhatikan kelestarian lingkungan alam (fisik) dan keharmonisan lingkungan sosial. Kedua dimensi ini harus dikelola dengan baik karena ketimpangan yang satu akan menimbulkan kerusakan pada yang lain.

7. Pengembangan Masyarakat Berketuhanan Yang Maha Esa

Teori sekularisme telah dipandang hanya merefleksikan sebagian kenyataan masyarakat dan hanya untuk tingkat tertentu sehingga faham sekularisme harus ditolak oleh bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia Baru harus tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan itu kehidupan manusia di dunia ini memiliki arti dan hanya dengan itu pula kita memiliki sumber etika dan moral yang luhur.

Implikasi Bagi Pendidikan

Kritik Nakagawa (Jawa Pos, 10 April 2000) dari *Kyoto City University of Arts* Jepang, bahwa pendidikan di Indonesia tidak memiliki konsep, patut kita jadikan sebagai bahan refleksi. Nakagawa mengutarakan bahwa setiap negara hendaknya memiliki sistem yang mandiri dalam pendidikannya. Jika Indonesia selalu mengacu pada pendidikan barat, Indonesia tidak akan pernah menemukan model pendidikan yang sesuai dengan dirinya sendiri. Model pendidikan Eropa, Amerika maupun Jepang bukanlah model untuk Indonesia. Model pendidikan untuk Indonesia harus dicari sendiri oleh bangsa Indonesia.

Pertanyaannya adalah model pendidikan macam apa yang sesuai untuk Indonesia? Model pendidikan yang baik adalah model pendidikan yang mampu

membentuk peserta didik menjadi leader atau pemimpin. Model ini bertumpu pada adanya kesempatan bagi anak didik untuk membuka jalannya sendiri dalam meraih ilmu, kemauan mengadakan penyelidikan secara mendalam, mandiri, mengedepankan pikiran kreatif, serta berani menantang masa depan dan berani mengambil resiko.

Sementara itu Djohar (Jawa Pos, 7 April 2000) berpendapat bahwa pendidikan yang bermakna untuk meningkatkan kualitas SDM adalah pendidikan yang memiliki kriteria: (a) mampu mempertahankan eksistensi hidup atau sukses dalam zamannya, (b) modern dan berbudaya, (c) menampilkan dirinya sebagai subyek pembangunan, (d) menjadikan individu untuk selalu belajar.

Masih banyak lagi model-model pendidikan yang ditawarkan oleh para ahli yang semuanya itu saling melengkapi sehingga bila dirumuskan dalam suatu kalimat maka model pendidikan yang mampu menyiapkan dan menciptakan Masyarakat Indonesia Baru memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Pendidikan nasional kita sebaiknya mampu melahirkan manusia yang demokratis dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan bangsa.
2. Pendidikan nasional kita diharapkan mampu melahirkan manusia yang kuat dan berkarakter, memiliki komitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan, memiliki moral dan etika yang luhur yang bersumber dari kepercayaan yang fungsional kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghayati dan bersungguh-sungguh menegakkan hak-hak asasi manusia.
3. Pendidikan nasional kita diharapkan mampu mengembangkan sikap kritis dan rasa ingin tahu yang tinggi yang tidak lekas puas, serta membebaskan diri dari segala sikap irasional dan pasrah, sehingga mampu memacu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pendidikan nasional kita setelah pendidikan tingkat dasar sebaiknya mengandung muatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam porsi yang jauh lebih besar dari muatan ilmu-ilmu sosial dan humaniora.
5. Pendidikan nasional kita diharapkan mampu melahirkan manusia yang siap hidup dalam masyarakat yang pluralistik dari segi suku, ras, agama, dan golongan, tetapi lebih homogen dari segi tingkat pendidikan dan kehidupan ekonomi.
6. Pendidikan nasional kita sebaiknya banyak mengandung muatan yang menampilkan keadaan dan prestasi berbagai negara sebagai perbandingan dalam berbagai bidang untuk menumbuhkan semangat bersaing yang sehat dengan masyarakat negara lain.
7. Pendidikan nasional kita diharapkan mampu melahirkan manusia yang sehat jasmani dan rohani yang menghargai kelestarian lingkungan fisik dan keharmonisan lingkungan sosialnya.
8. Dewasa ini institusi pendidikan bukan satu-satunya tempat untuk belajar. Perkembangan teknologi informasi telah memperluas jaringan belajar, *web of learning*. Oleh karena itu, ilmu pendidikan perlu mencari cara-cara yang efektif agar pendidikan di sekolah dapat menjadi dasar untuk mengembangkan diri di luar sekolah. Maka, proses pengajaran telah bergeser menjadi proses belajar.
9. Di tengah arus perubahan cepat pendidikan sebaiknya berorientasi pada peningkatan kemampuan pembelajar untuk menentukan diri, artinya ia harus mampu mengadakan pilihan-pilihan yang tepat di tengah semakin terbukanya berbagai alternatif.

10. Pendidikan hendaknya mencakup pemberdayaan peserta didik dalam tiga hal, yaitu agar a) mampu berbuat (*power to*) b) mampu bekerja sama (*power with*) yang merupakan prasarat bagi kehidupan sosial, c) mampu mengaktualisasikan diri sebagai manusia sesuai dengan martabatnya (*power within*), yaitu antara lain membangun kepercayaan diri, harga diri, kesadaran akan kebebasan dan hak-hak asasinya.
11. Pendidikan hanya menjadi utuh kalau pendidikan membantu agar orang mampu berefleksi, mampu mengevaluasi tindakannya dan mampu menilai.
12. Akhirnya pendidikan hendaknya mencakup *civic education* dan etika. Melalui *civic education* diharapkan berkembangnya kemampuan untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai warganegara. Melalui etika diharapkan tumbuhnya kesadaran akan imperatif etis yang menjadi bagian dari aktualisasi dirinya sebagai manusia.

Implementasi ke-12 ciri tersebut dalam praksis pendidikan membawa konsekuensi reorientasi dalam bidang kurikulum, strategi pembelajaran, hubungan guru dengan siswa, dan evaluasi.

Kurikulum hendaknya disajikan secara terintegrasi, terfokus pada konsep umum, bahan pelajaran disajikan mulai dari keseluruhan ke bagian-bagian (Diptoadi, 1997).

Dalam hal strategi pembelajaran perlu diperhatikan hal-hal berikut: (a) sajikan masalah-masalah aktual kepada peserta didik dalam konteks yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka, (b) beri dorongan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, (c) kondisikan agar peserta didik mampu menemukan jawaban dari pertanyaannya sendiri, (d) beranikan ia mengemukakan pendapat dan harga sudut pandangnya, (e) tantang dia untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam,

bukan sekedar penyelesaian tugas, (f) anjurkan peserta didik bekerja dalam kelompok, (g) dorong mereka untuk berani menerima tanggung jawab (Merril, 1999, dan Perkins, 1991).

Makna belajar jangan dipahami sebagai "siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan", tetapi makna belajar adalah "siswa menyusun atau membangun sendiri pengetahuan dan keterampilannya". Konsekuensinya hubungan guru-siswa tidak searah, melainkan hubungan yang interaktif (Degeng dan Suhardjono, 1997).

Evaluasi formatif lebih penting daripada evaluasi sumatif karena evaluasi formatif memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jenis evaluasi yang digunakan lebih merupakan *goal-free evaluation* sebagai alat untuk melakukan *self analysis*. Teknik evaluasi yang digunakan berupa; observasi terhadap kegiatan yang dilakukan peserta didik, pameran hasil karya peserta didik, portofolio atau kumpulan dokumen tentang kegiatan peserta didik, studi etnografi (Ardhana, 1997).

Penutup

Perwujudan Masyarakat Indonesia Baru bukanlah pekerjaan mudah. Namun demikian tetap perlu diperjuangkan sebagai jawaban atas krisis moral, sosial dan ekonomi yang masih kita hadapi sampai saat ini. Perwujudannya tidak dapat dilakukan secara revolusioner, melainkan secara terprogram, bertahap, sistematis, dan memerlukan dukungan semua pihak.

Tanpa mengesalkan peran bidang lain, sesungguhnya institusi yang paling bertanggung jawab dalam hal pembentukan Masyarakat Indonesia Baru adalah institusi pendidikan. Oleh sebab itu, jika kita menghendaki Masyarakat Indonesia Baru yang bebas dari sifat-sifat negatif, perlu melakukan reorientasi pendidikan

(kurikulum, strategi pembelajaran, evaluasi). Model pendidikan yang selama ini diterapkan terbukti belum mampu melahirkan manusia yang jujur, sportif, mandiri dan kreatif.

Daftar Pustaka

- Ardhana, W. (1997). *Pandangan Konstruktivistik tentang Pemecahan Masalah Belajar*. Malang: Program Pascasarjana IKIP Malang.
- Degeng, I. N. S., dan Suhardjono. (1997). *Analisis Komparatif Pandangan Behavioristik vs Konstruktivistik tentang Pemecahan Masalah Belajar*. Malang: Program Pascasarjana IKIP Malang.
- Djohar. (7 April 2000). "Menuju Pendidikan Bermakna", *Jawa Pos*, hlm. 4.
- Diptoadi, V. L. (1997). *Perbedaan Kelas Tradisional dan Kelas Konstruktivistik*. Malang: Program Pascasarjana IKIP Malang.
- Hikam, M. A. S. (1999). *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Merril, M.D. (1991). "Constructivism and Instructional Design", *Educational Technology*, 31(5). 45 - 52.
- Nakagawa, S. (10 April 2000). "Pendidikan Indonesia Tak Punya Konsep", *Jawa Pos*, hlm. 1.